



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(L K j I P)

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMPANG
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan pada urusan Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sampang secara transparan dan akuntabel maka diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) setiap akhir tahun anggaran.

LKJIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah/Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014..

Kami mengharapkan kiranya LKJIP Tahun 2022 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandat dan *stakeholders* .

Semoga LKJIP Tahun 2022 ini selain sebagai media pertanggungjawaban yang diemban oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Sampang, Februari 2023
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sampang



Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641005 199210 2 001

BAB 1 PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyalarsan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyalarsan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

A. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan di bidang Perdagangan dan Perindustrian Agar program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka diperlukan akuntabilitas yang baik, teratur dan transparan dari pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja (LKj)

maka setiap Penyelenggara Negara harus membuat dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan dasar latar belakang tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan dapat memberikan data, informasi dan deskripsi tingkat pencapaian pelaksanaan tugas-tugas dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran, dan juga dapat megembangkan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada pihak yang memberi mandat/amanah yaitu Bupati Sampang, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal - hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;

2. Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang; dan
4. Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Kedudukan

Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, selanjutnya disingkat Diskopindag, sangat strategis didalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di daerah dimana keberadaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dan telah diubah dengan keluarnya Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.

Adapun kedudukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang adalah:

- Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.serta tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- a. perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Program; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perindustrian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah perlu kami jelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai, Pangkat dan Jenis Kelamin.

Keadaan Pegawai di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Gol/Eselon	Jumlah (org)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	PNS		

	Gol. I	0	
	Gol. II	60	2
	Gol. III	20	12
	Gol. IV	5	3
2.	CPNS	-	-
3.	Honor daerah	3	-
4.	Magang	208	8
Jumlah		296	25

b. Kondisi Sarana Penunjang Kegiatan

Untuk mendukung kinerja pegawai Diskopindag, diperlukan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan . Sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Daftar Sarana/Prasarana Diskopindag Tahun 2022

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung (Ged Kantor, Pasar, Gudang, Bengkel)	31	Baik
2	Kendaraan Dinas		
	- Roda Empat	4	Baik
	- Roda Dua	53	Baik
	- Roda Tiga	14	Baik
3	Almari Besi	4	Baik
4	AC	26	Baik
5	Komputer	12	Baik
6	Printer	28	Baik
7	LCD	2	Baik
8	Laptop	30	Baik

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa prasarana dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang yaitu gedung dengan dilengkapi parkir, aula dan kamar mandi. Terdapat 31 bangunan gedung yang terdiri atas gedung kantor Diskopindag, bangunan gudang, pasar tradisional/hewan, gedung Dekranasda, gedung Rumah Kemasan. Sedangkan sarana terdiri kendaraan dinas roda empat, roda tiga dan roda dua, lemari, AC, komputer, printer dan laptop.

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Diskopindag Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Diskopindag Kabupaten Sampang.

D. ISU STRATEGIS

Hasil analisa isu strategis seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang diantaranya :

Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UM
- b. Pertumbuhan usaha mikro berlegalitas dan berkembang
- c. Akses permodalan yang mendukung

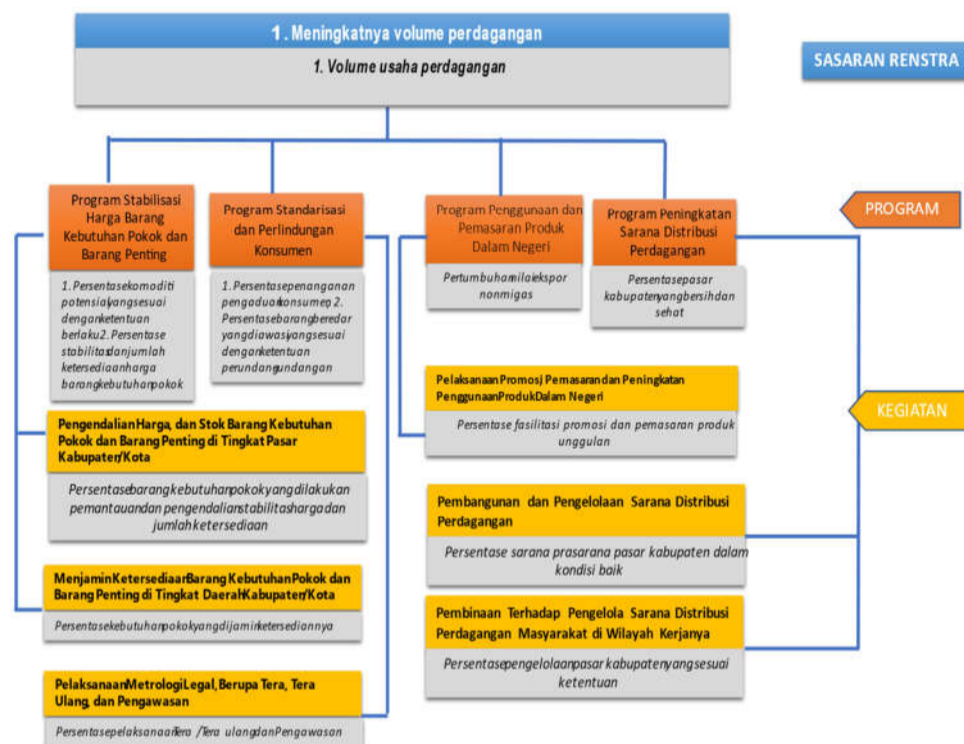
Perindustrian :

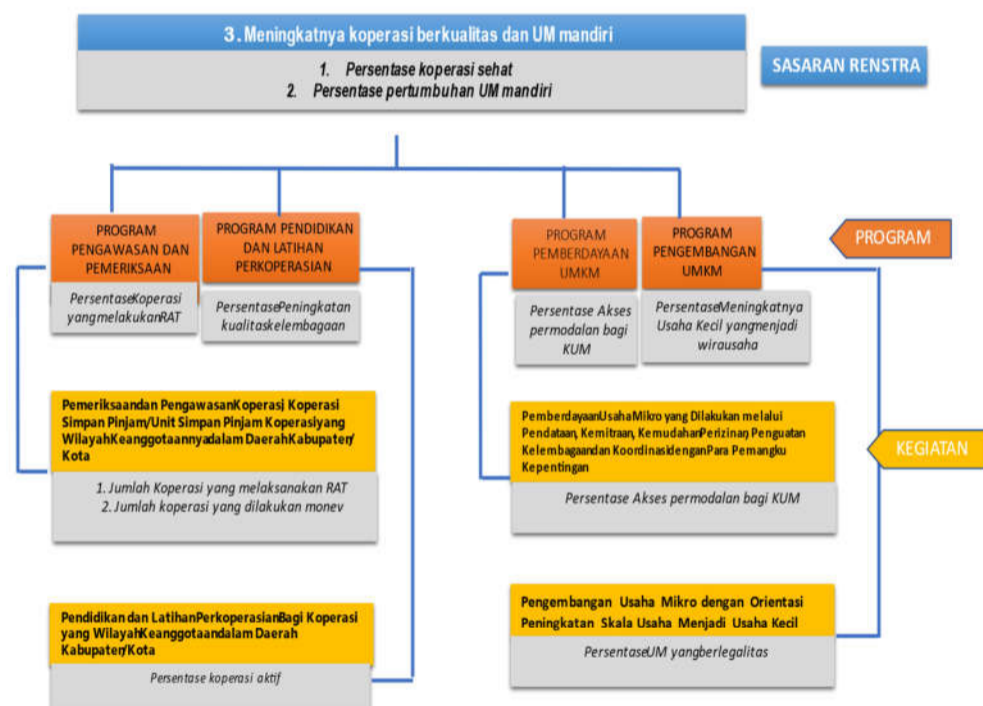
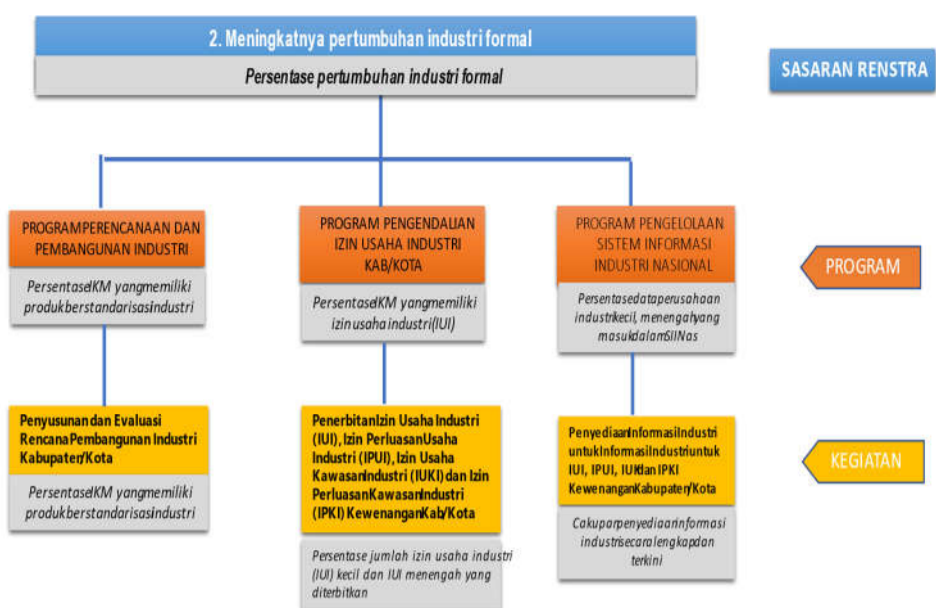
- a. Peningkatan jumlah IKM yang berlegalitas
- b. Standarisasi produk IKM (sertifikasi halal, SNI, HACCP, ISO, BPOM)
- c. Peningkatan daya saing produk (desain, packaging) dan HKI
- d. Pengembangan industri kreatif

Perdagangan :

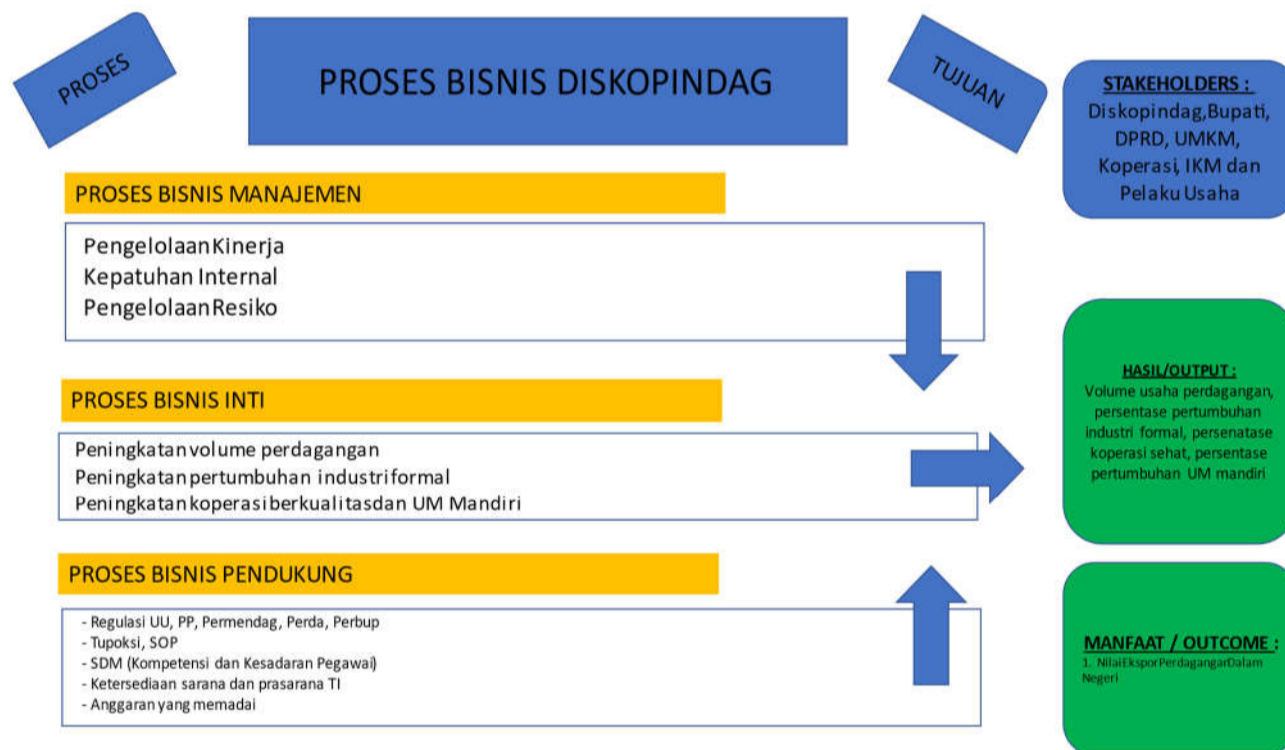
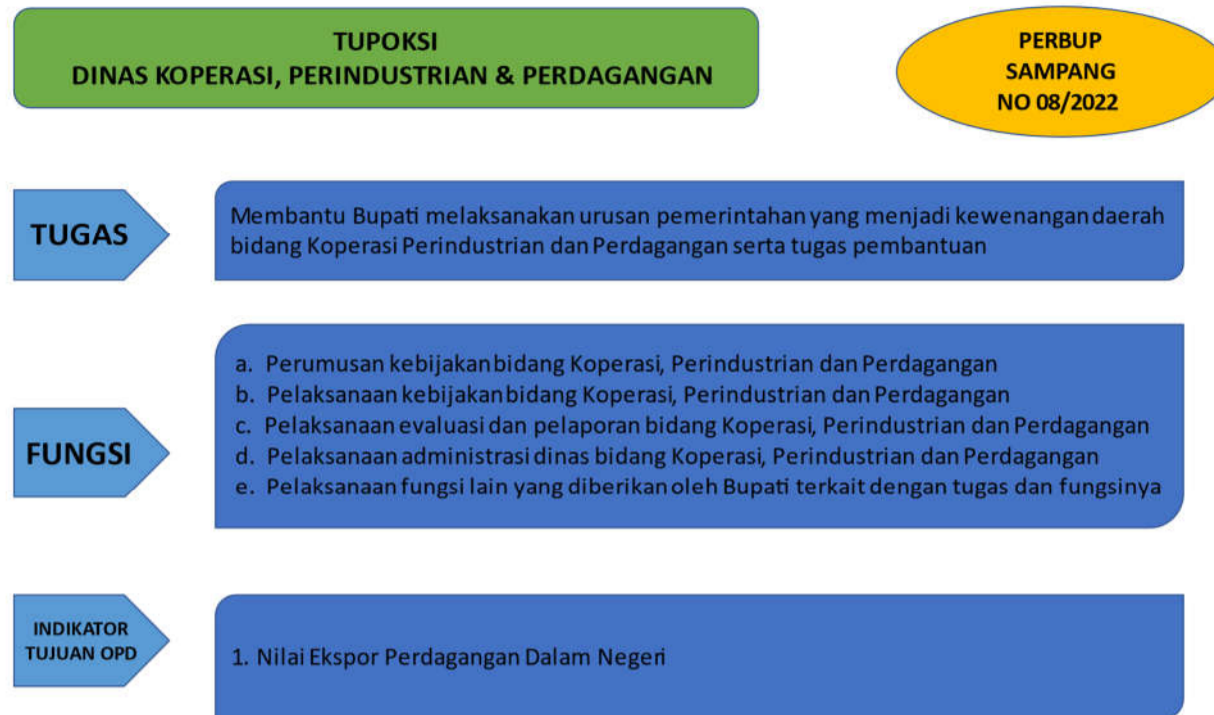
- a. Perluasan akses pemasaran dan sarana promosi produk UM dan IKM
- b. Pengembangan kemitraan dengan retail, marketplace dan platform lainnya
- c. Optimalisasi metrologi legal (tera/tera ulang)
- d. Peningkatan kualitas sarana prasarana distribusi perdagangan (pasar) dan pengelolaannya

E. CASCADING DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





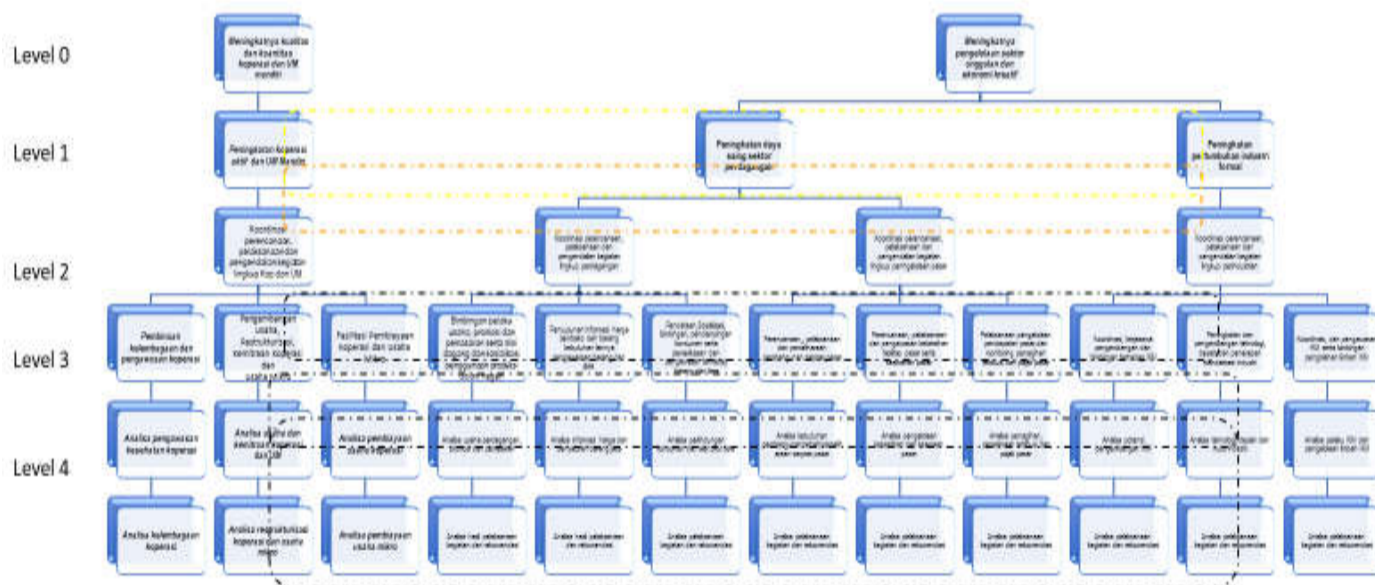
E. PETA PROSES BISNIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



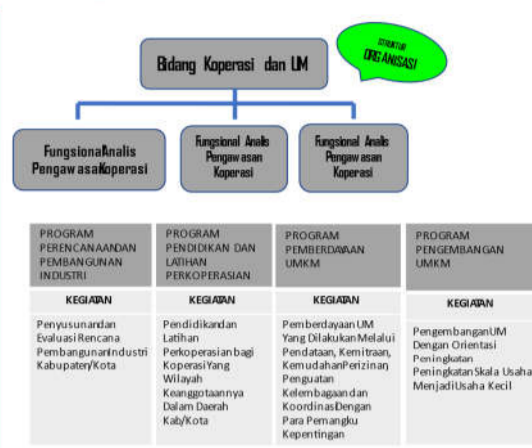
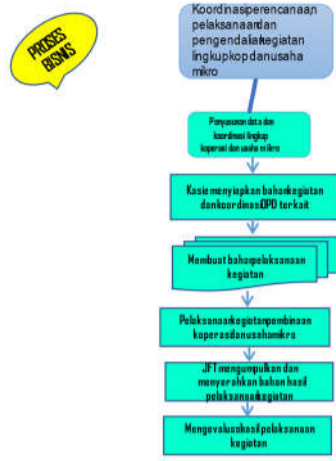
Proses Bisnis Manajemen



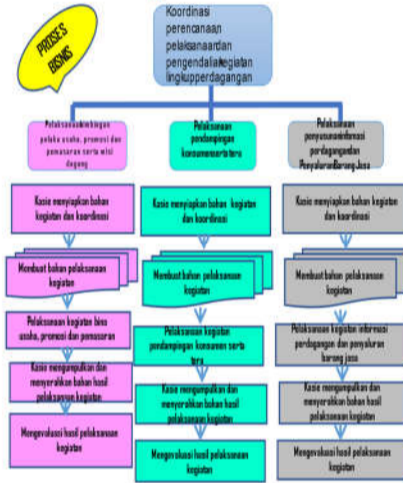
PROSES BISNIS INTI DISKOPINDAG 2019-2024



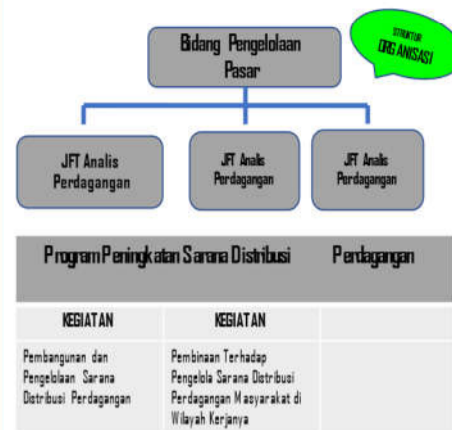
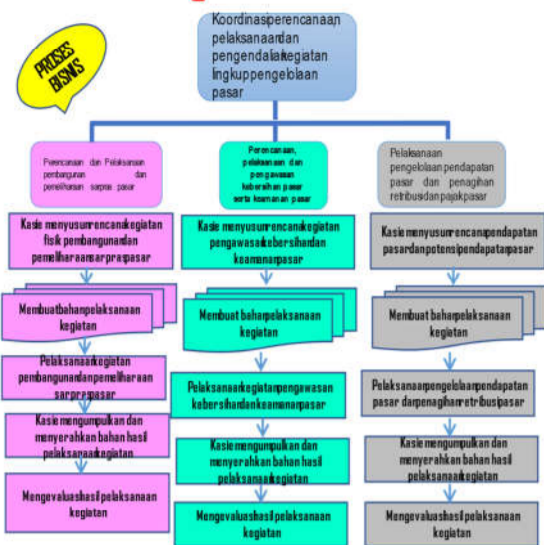
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



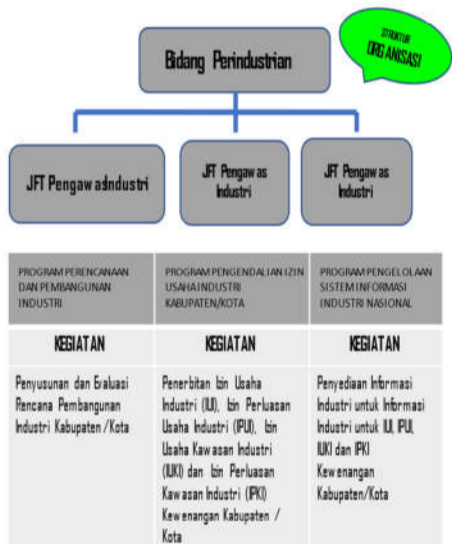
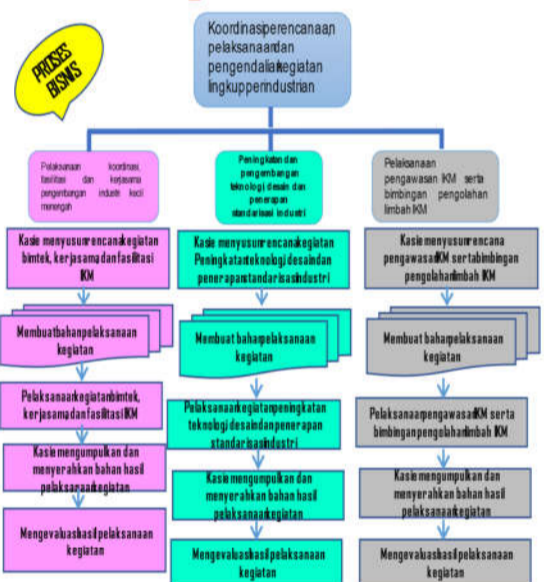
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ringkasan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 Diskopindag adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
2. Menyusun dan menetapkan metode pengumpulan data untuk pengukuran kinerja
3. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi
4. Pengukuran kinerja harus digunakan untuk menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan
5. Pengukuran kinerja harus digunakan untuk penyesuaian :
 - Organisasi
 - Strategi dalam mencapai kinerja
 - Kebijakan dalam mencapai kinerja
 - Aktivitas dalam mencapai kinerja
 - Anggaran dalam mencapai kinerja
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
7. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tidak dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, karena tidak ada bukti perbaikan atas tindak lanjut rekomendasi LHE

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang berisi tujuan, sasaran dan strategi perangkat daerah atau yang disebut Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam Renja tahunan memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana dalam tabel lampiran di bawah berikut. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Diskopindag Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Diskopindag Tahun 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp. 884,10 M
		Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	2,80 %
		Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM mandiri	Persentase koperasi sehat	51,06 %
			Persentase pertumbuhan UM mandiri	3,48 %

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja ini yang menjadi dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari pejabat eselon 2 sampai dengan staff.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendapat alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 17.431.183.490,- terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 Belanja Operasi : Rp. 11.933.651.429,00
 Belanja Modal : Rp. 89.918.995,00
2. Program Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 Belanja Operasi : Rp. 4.494.819.768,00
 Belanja Modal : Rp. 912.793.298,00

Untuk Program Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 11 program, 13 kegiatan, dan 22 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp 884,10 M	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.106.761.554,00 88.514.589,00 121.987.647,00 377.509.991,00
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	2,80 %	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	499.540.866,00 15.205.447,00 20.769.388,00
3.	Meningkatnya Koperasi	Persentase koperasi sehat	51,06 %		149.999.155,00

berkualitas dan UM mandiri	Persentase Pertumbuhan UM mandiri	3,48 %	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	404.199.236,00
			2. Program Pendidikan Dan Latihan Koperasi	301.645.565,00
			3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	321.479.628,00
			4. Program Pengembangan UMKM	

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 disajikan dalam Lampiran 2.1

Adapun Matriks Renstra yang memuat Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tabel di bawah berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RENSTRA) Diskopindag Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan :										
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	10,94 M	12,01 M	12,42 M	13,00 M	13,11 M	13,41 M	13,93 M	13,93 M
Sasaran :										
1	Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	853,70	878,38	873,85	875,90	884,10	892,90	902,80	902,80
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	3,15	2,60	3,13	3,17	2,80	3,96	4,07	4,07
3	Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM mandiri *	Persentase koperasi sehat*	N/A	48,16	52,70	46,98	51,06	49,47	50,69	50,69
		Persentase pertumbuhan UM mandiri*	2,58	2,76	3,18	3,42	3,48	3,54	3,60	3,60



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (HASIL PENAJAMAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SLAMET JUNAIDI**
Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 08 Agustus 2022

Pihak Kedua,

Bupati Sampang

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sampang**

Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI
NIP. 19641005 199210 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (HASIL PENAJAMAN)
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume Usaha Perdagangan	884,10 M
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal	Persentase Pertumbuhan Industri Formal	2,80
3	Meningkatnya Koperasi Berkulitas dan UM Mandiri	Persentase Koperasi Sehat	51,06
		Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	3,48

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.023.570.424	DAU
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	149.999.155	DAU
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	404.199.236	DAU, DAK
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	301.645.565	DAU
5	Program Pengembangan UMKM	Rp	321.479.628	DAU
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	3.106.761.554	DAU
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok Dan Barang Penting	Rp	88.514.589	DAU
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	121.987.647	DAU
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	377.509.991	DAU
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	499.540.866	DAU, DBHCHT
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp	15.205.447	DAU
12	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	20.769.388	DAU

Sampang, 08 Agustus 2022

PIHAK KEDUA

Bupati Sampang



H. SLAMET JUNAIDI

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
Dan Perdagangan Kabupaten Sampang



KARTINI KAPTIATI
NIP. 19641005 199210 2 001

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana perjanjian kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab III. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan target dan realisasi setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

A. CAPAIAN KINERJA

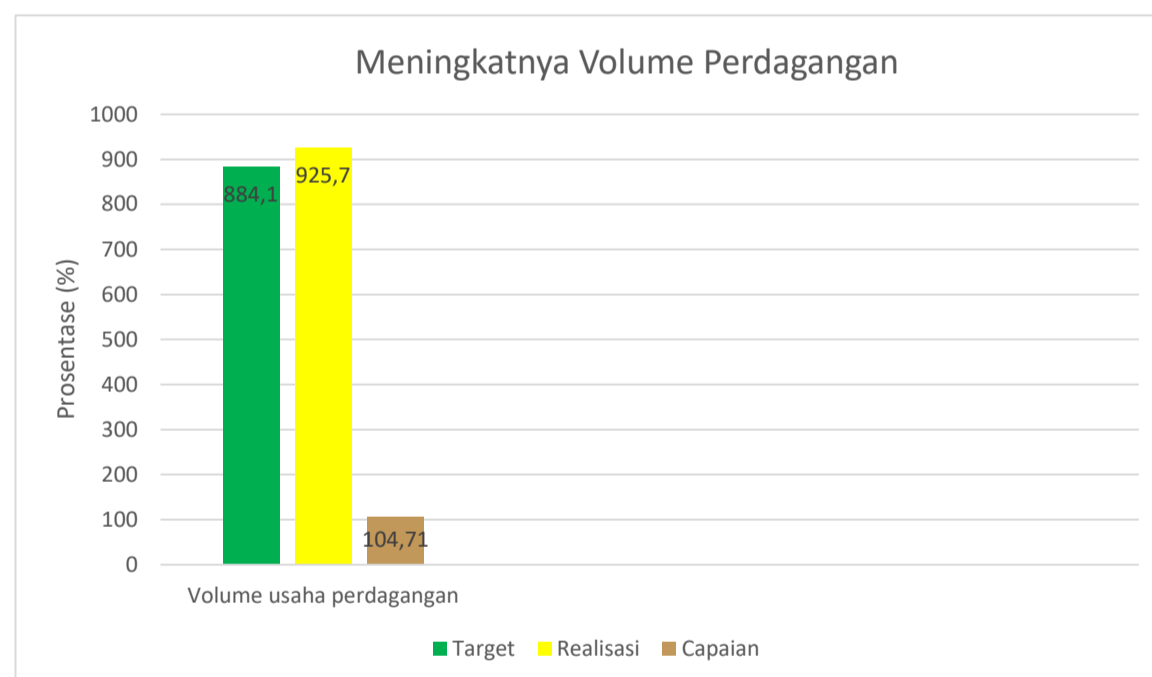
1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp 877,99 M	Rp 884,10 M	Rp 925,7 M	104,71%
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	4,91 %	2,80 %	4,68%	167,14%
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	Persentase koperasi sehat	46,98 %	51,06 %	51,06 %	100 %
		Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	4,15 %	3,48 %	18,14 %	521,26 %

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp 877,99 M	Rp 884,10 M	Rp 925,7 M	104,71%

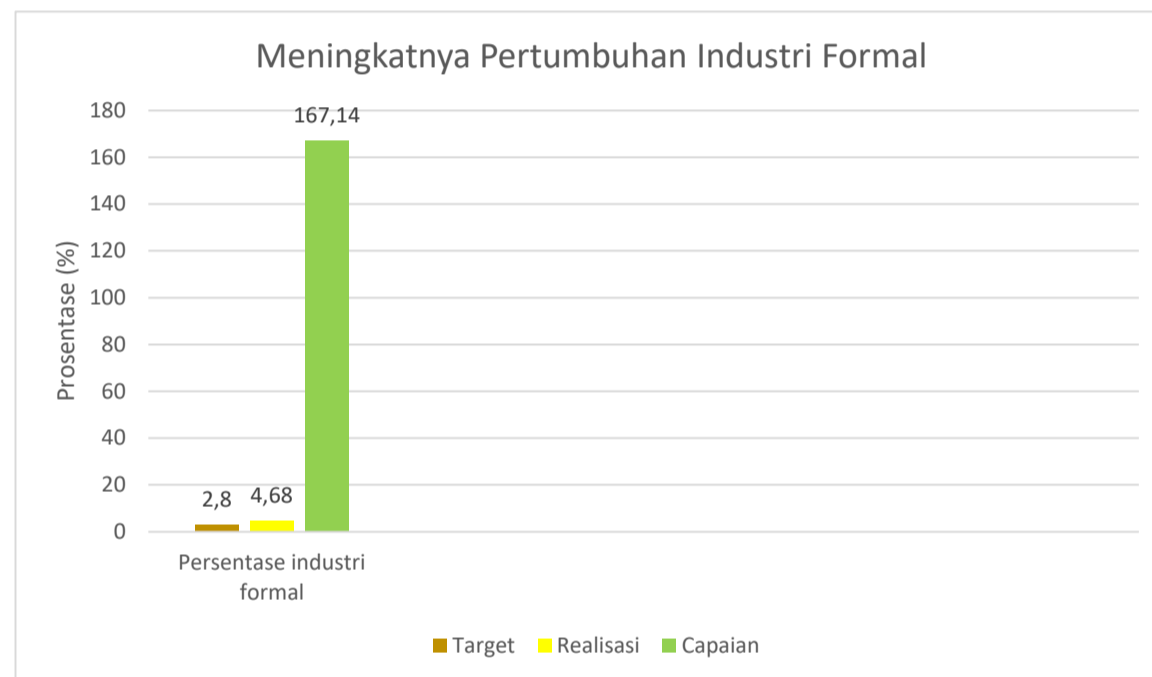


Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja **volume usaha perdagangan** adalah **jumlah/nilai transaksi perdagangan sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya selama tahun 2022** yaitu Rp. 925.700.000.000 dari target Rp. 884.100.000.000 atau capaiannya mencapai 104,71%. Adapun bahan pokok dan barang penting lainnya adalah sebagai berikut; sapi, kambing, unggas, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, perikanan, jagung, beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur dan bawang putih.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya pertumbuhan industri formal

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	4,91 %	2,80 %	4,68%	167,14%



Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Indikator Kinerja persentase pertumbuhan industri formal :

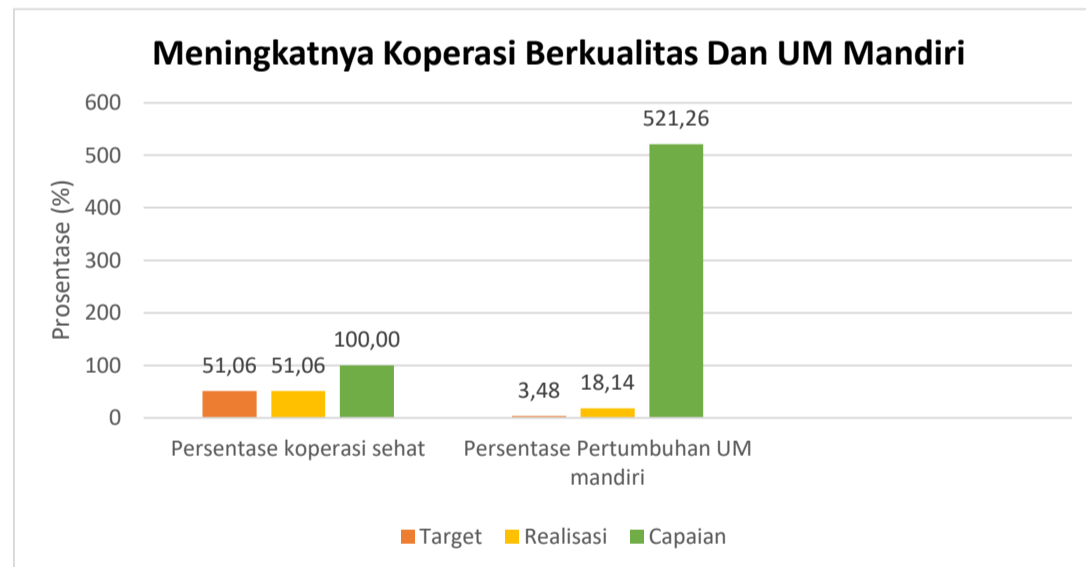
merupakan perhitungan rumus operasional yaitu :

$\frac{\text{Jumlah industri tahun } N - \text{Jumlah industri tahun } N-1}{\text{Jumlah industri tahun } N-1} \times 100\%$, diperoleh hasil : $\frac{761-727}{727} \times 100\% = 4,68\%$,

Industri formal merupakan pelaku usaha industri yang telah memiliki izin. Jumlah industri formal s/d tahun 2021 adalah 727 industri dan selama tahun 2022 jumlah tersebut bertambah 34 industri formal yang berdiri dan telah berizin, sehingga akumulasi jumlah industri formal s/d tahun 2022 yaitu 761 industri. Target tahun 2022 2,80% dengan realisasi 4,68% maka capaian kinerja indicator ini sebesar 167,14%. Secara umum di Kabupaten Sampang masih banyak pelaku industri mikro/kecil yang tidak memiliki dokumen perizinan, sehingga masih perlu upaya pembinaan IKM untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha industri mikro/kecil untuk mengurus dokumen perizinan.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	Persentase koperasi sehat	46,98 %	51,06 %	51,06 %	100 %
		Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	4,15 %	3,48 %	18,14 %	521,26 %



Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase koperasi sehat adalah indikator baru hasil penajaman dengan formula rumusan **Jumlah koperasi berkualitas th N dibanding dengan jumlah koperasi aktif th N**. Pada tahun 2022 target yang dicanangkan sebesar 51,06%. Terdiri dari jumlah Koperasi yang berkualitas 145 Koperasi dibanding dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 284 koperasi terealisasi sebesar 51,06%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja untuk Persentase koperasi sehat tercapai 100%.
- b. Indikator Persentase Pertumbuhan UM Mandiri merupakan indikator baru hasil penajaman dengan rumusan **pertambahan jumlah UM Mandiri pada tahun berjalan (2022) dikurangi dengan jumlah UM Mandiri pada tahun sebelumnya (2021) dibandingkan dengan jumlah UM Mandiri pada tahun sebelumnya (2021)**. Tahun 2021 jumlah UM mandiri sebesar 2.199, dan tahun 2022 bertambah menjadi 2.598. Dari target pertumbuhan 3,48% pada tahun 2022 terealisasi sebesar 18,14%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 521,26%.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Analisis Capaian Kinerja tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Sasaran Tahun 2022		2021			2022		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp 875,9 M	Rp 877,99 M	100,24%	Rp 884,10 M	Rp 925,7 M	104,71%
Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	3,17%	4,91%	154,9%	2,80%	4,68%	167,14%
Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM mandiri	Persentase koperasi sehat	46,98%	46,98%	100%	51,06%	51,06%	100%
	Persentase pertumbuhan UM mandiri	3,42%	4,15%	121,35%	3,48%	18,14%	521,26%

Pada 3 (tiga) Sasaran Strategis telah terjadi peningkatan capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Dari seluruh indikator kinerja sasaran, terjadi peningkatan capaian kinerja, hanya ada 1 indikator kinerja yang tidak mengalami peningkatan capaian kinerja yaitu pada indikator persentase koperasi sehat,

dimana capaian tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%. Ini dikarenakan persentase koperasi sehat adalah indikator baru hasil penajaman, sehingga untuk target 2021 dan 2022 dipasang sesuai dengan realisasi tahun yang bersangkutan.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam periode perencanaan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian progress %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp. 925,7 M	Rp. 902,80 M	102,54 %
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	4,68 %	4,07 %	114,99 %
3	Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM mandiri	Persentase koperasi sehat	51,06 %	50,69 %	100,73 %
		Persentase pertumbuhan UM mandiri	18,14 %	3,60 %	503,9 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, secara umum telah mencapai progress capaian yang sangat baik, akan tetapi pada sasaran strategis Meningkatkan Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri, pada indikator kinerja Persentase koperasi sehat yang masih mencapai progress yang paling rendah yaitu 100,73%.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Capaian progress %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya volume perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp. 925,7 M	N/A	N/A

2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	4,68 %	N/A	N/A
3	Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM mandiri	Persentase koperasi sehat	51,06 %	N/A	N/A
		Persentase pertumbuhan UM mandiri	18,14 %	N/A	N/A

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Masing-masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaiannya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Volume Perdagangan dengan Indikator kinerja **Volume usaha perdagangan** dengan capaian kinerja **104,71%** kategori sangat berhasil. Upaya peningkatan yang telah dilakukan di antaranya adalah :

- a. meningkatkan kualitas layanan perdagangan melalui pembangunan/rehabilitasi pasar
- b. menerapkan penarikan retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi) serta meningkatkan promosi pemasaran produk.
- c. meningkatkan fasilitasi pemasaran produk-produk daerah ke pasar luar kabupaten melalui promosi baik offline (event pameran) dan online
- d. meningkatkan pemantauan ketersediaan/stok dan harga bahan-bahan pokok dan barang melalui monitoring dan pemanfaatan sistem informasi harga dan stok di pasar

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan persentase pertumbuhan industri formal dengan indicator kinerja **persentase pertumbuhan industri formal** pada tahun 2022 capaian kinerja 167,14%.

Upaya peningkatan (inovasi) yang telah dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pembinaan/pelatihan terhadap pelaku-pelaku IKM dan standarisasi produk (SNI, sertifikat halal, merk, redasain kemasan)
2. Meluncurkan galeri produk unggulan IKM secara elektronik berbasis android (aplikasi SIP6.IKM)
3. Melakukan pembinaan diversifikasi produk unggulan kerajinan tanah liat (kerajinan gerabah) di mana selama ini IKM hanya memproduksi genteng.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri dengan indikator kinerja **Persentase koperasi sehat :**

- a. Penyebab tercapainya kinerja dikarenakan adanya :
1. Kenaikan koperasi berkualitas, yaitu koperasi aktif yang dinilai sehat dalam tiga aspek yakni dari aspek usaha, kelembagaan dan keuangannya. Diantaranya koperasi aktif yang melaksanakan dan melaporkan RAT secara rutin dan berturut-turut, kepengurusan konsisten, laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan.
 2. Serta karena adanya penambahan koperasi baru yang menyebabkan jumlah koperasi aktif naik
- b. Solusi yang dilakukan mengupayakan dalam peningkatan Persentase koperasi sehat yaitu :
- Melakukan pembinaan penyuluhan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) melalui pendampingan pembuatan laporan RAT kepada pengurus koperasi.
 - Melakukan pembinaan secara intensif dan juga melakukan monitoring evaluasi kepada gerakan koperasi disamping sinergi dengan tim satgas yang dari provinsi.

Indikator berikutnya yakni **Persentase Pertumbuhan UM Mandiri** :

- a. UM Mandiri adalah hasil binaan terhadap pelaku usaha mikro yang dalam katagori usaha yang mempunyai legalitas NIB, produktif, berkembang serta proses legalitasnya berkelanjutan, berkemitraan dan asset serta omset berkembang.
- b. Solusi yang dilakukan upaya Pertumbuhan UM Mandiri yaitu dengan mapping data melalui pembuatan basis data, mengaktifkan fungsi Tenaga Konsultan Bisnis (TKB) sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan berbagai program tentang UM, juga dilakukan pemberian izin usaha (NIB) agar Kedepannya para pelaku UM dapat mengakses informasi terkait kegiatan bisnis dan permodalan dengan pihak-pihak lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Anggaran

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan antara pengelolaan anggaran terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran strategis, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2022 secara umum telah dapat mencapai sasaran

pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Efisiensi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		CAPAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN	Ket
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume usaha perdagangan	Rp. 884,10 M	Rp. 925,7 M	104,71 %	Rp. 3.694.773.781	Rp. 3.630.748.281	98,27 %	Efisien
2	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	Persentase pertumbuhan industri formal	2,80 %	4,68 %	167,14 %	Rp. 535.515.701	Rp. 533.926.450	99,70 %	Efisien
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri *	Persentase koperasi sehat *	51,06 %	51,06 %	100 %	Rp. 1.177.323.584	Rp. 1.075.599.389	91,36 %	Efisien
		Persentase Pertumbuhan UM mandiri *	3,48 %	18,14 %	521,26 %				

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada sasaran “Meningkatnya pertumbuhan industri formal”, dengan penyerapan anggaran sebesar 99,70%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada sasaran “Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM Mandiri”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,36%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang lebih dari 90% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 17.431.183.490,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.883.919.189,00 (91,12%). Anggaran dan realisasi Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.984.730,00	1.955.250,00	98,51
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	779.988,00	769.800,00	98,69
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.134.875,00	1.110.000,00	97,81
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.536.872.784,00	9.203.995.302,00	87,35
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.014.970,00	1.014.750,00	99,98
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.014.970,00	1.014.925,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.929.000,00	14.297.000,00	95,77
2	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.959.002,00	14.959.000,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.844.132,00	45.843.500,00	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.881.268,00	39.580.000,00	96,82
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.899.717,00	34.899.500,00	100,00

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.470.000,00	90,36
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.995.000,00	12.272.500,00	61,38
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.121.000,00	137.898.207,00	97,03
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.162.500,00	27.593.000,00	97,98
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.756.495,00	61.558.000,00	99,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.984.000,00	1.047.800,00	35,11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	789.736.029,00	780.363.087,00	98,81
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	125.250.000,00	86,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.600.000,00	68.522.525,00	98,45
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	14.734.400,00	99,56
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.920.000,00	49.189.523,00	98,54
	SASARAN STRATEGIS 3			
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	81.895.339,00	79.395.000,00	96,95
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.103.816,00	58.321.500,00	85,64
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.199.236,00	343.257.100,00	84,92
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	48.898.325,00	47.265.000,00	96,66
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	52.194.791,00	50.540.100,00	96,83
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200.552.449,00	184.403.989,00	91,95
E	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	321.479.628,00	312.416.700,00	97,18
	SASARAN STRATEGIS 1			
F	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.034.206.805,00	999.378.431,00	96,63
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.549.991.134,00	1.546.423.150,00	99,77
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	522.563.615,00	522.485.600,00	99,99

G	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.515.057,00	22.439.000,00	87,94
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	62.999.532,00	62.270.000,00	98,84
H	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	121.987.647,00	117.419.700,00	96,26
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0,00	0,00	
I	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	259.486.080,00	250.280.050,00	96,45
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	118.023.911,00	110.052.350,00	93,25
	SASARAN STRATEGIS 2			
J	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	177.516.563,00	177.406.250,00	99,94
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	0,00	

3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	291.211.280,00	289.965.550,00	99,57
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.813.023,00	30.637.000,00	99,43
K	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.205.447,00	15.191.375,00	99,91
L	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	20.769.388,00	20.726.275,00	99,79
J U M L A H		17.431.183.490,00	15.883.919.189,00	91,12

7. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya. yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang diuraikan sebagai berikut :

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2022 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 17.431.183.490,00** yang terdiri atas :

- Belanja Langsung sebesar : Rp. 17.431.183.490,00

2. Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun anggaran 2022

Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 15.883.919.189,00

Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja. dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.

Belanja langsung

- Anggaran DPA : Rp. 17.431.183.490,00
- Realisasi Belanja : Rp. 15.883.919.189,00 (91,12%)
- **Sisa Anggaran** : Rp. 1.547.264.301,00

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang melaksanakan 12 program, 20 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

Diskopindag juga merupakan OPD penghasil, yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sumber pendapatan daerah. PAD ini juga memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran strategis dinas yang pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 64,44 % dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp. 5.500.000.000	Rp. 3.475.649.000	63,19
2	Retribusi Pelayanan Tera	Rp. 75.000.000	Rp. 50.270.000	67,03
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp. 900.000.000	Rp. 568.922.000	63,21
4	Jasa Giro Daerah	Rp. 4.000.000	Rp. 6.266.215,42	156,66
5	Hasil Pengelolaan Dagulir	Rp. 65.000.000	Rp. 115.748.823	178,08
Total		Rp. 6.544.000.000	Rp. 4.216856.038,42	64,44

Ada beberapa kendala yang menyebabkan PAD hanya tercapai sebesar 64,44% adalah:
Hambatan :

1. Retribusi pasar berkurang karena banyaknya pedagang yang tidak mau membayar retribusi karena fasilitas yang kurang memadai
2. Semakin banyaknya pasar semi modern dan toko online sehingga pasar tradisional menjadi lebih sepi dan pengunjung banyak berkurang sehingga berpengaruh pada sektor retribusi parkirnya

Penyelesaian :

1. Tetap dilakukan penagihan dan teguran atas pedagang yang tidak mau membayar
2. Memperbaiki sarpras yang ada di pasar tradisional

8. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Laporan SAKIP Diskopindag Tahun 2022 yang telah dievaluasi oleh Tim SAKIP Kabupaten Sampang serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut ini.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyusun dan menetapkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Telah disusun dan ditetapkan Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara pengukuran indikator kerjanya yang tercantum dalam IKU Diskopindag
2.	Menyusun dan menetapkan metode pengumpulan data untuk pengukuran kinerja	Disusun dan ditetapkan metode pengumpulan data untuk pengukuran kinerja yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui 2 (dua) sumber utama yaitu: 1. Sumber Data Internal, yakni data yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. 2. Sumber Data Eksternal, yakni merupakan data yang berasal dari luar OPD baik berupa data primer maupun data sekunder.
3.	Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Sampang
4.	Pengukuran kinerja harus digunakan untuk menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan	Hasil Pengukuran Kinerja untuk dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan sudah mulai dilaksanakan dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan yang mengacu pada Perbup No. 50 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

		Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
5.	<p>Pengukuran kinerja harus digunakan untuk penyesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi - Strategi dalam mencapai kinerja - Kebijakan dalam mencapai kinerja - Aktivitas dalam mencapai kinerja - Anggaran dalam mencapai kinerja 	<p>Pengukuran kinerja sudah digunakan untuk penyesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi - Strategi dalam mencapai kinerja - Kebijakan dalam mencapai kinerja - Aktivitas dalam mencapai kinerja - Anggaran dalam mencapai kinerja
6.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)</p>	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sudah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dengan upload dokumen pada aplikasi e-sakip reuiu dan aplikasi sakip kabupaten</p>
7.	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tidak dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, karena tidak ada bukti perbaikan atas tindak lanjut rekomendasi LHE</p>	<p>Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (Outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.</p>

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2022 ini dapat dicapai. Sedangkan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan rata-rata persentase capaian >100%.

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 91,12%. Pencapaian tersebut perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut :


1. Meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga dalam merencanakan program dan kegiatan tepat dan mengena pada sasaran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan;
3. Meningkatkan SDM pegawai dengan kursus-kursus, diklat
4. Konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG



Dra. Hj. Suhartini Kaptiati
NIP. 19641005 199210 2 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JABATAN : KEPALA DINAS

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	1. Meningkatnya volume perdagangan	1 Volume usaha perdagangan	Rp. 884,10 M	Rp. 925,7 M	104,71 %
		2. Meningkatnya pertumbuhan industri formal	1 Persentase pertumbuhan industri formal	2,80%	4,68%	167,14%
		3. Meningkatnya koperasi berkualitas dan UM Mandiri	1 Persentase koperasi sehat	51,06%	51,06%	100%
			2 Persentase pertumbuhan UM mandiri	3,48%	18,14%	521,26%

Mengetahui Atasan Langsung

Sekretaris Daerah



Yuliadi Setiawan, S.Sos, MM
NIP. 19660711 198809 1 001

Sampang, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sampang



Dra. Hj. Suhartini Kaptiati
NIP. 19641005 199210 2 001

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.984.730,00	1.955.250,00	98,51
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	779.988,00	769.800,00	98,69
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	779.988,00	769.000,00	98,59
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.134.875,00	1.110.000,00	97,81
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.536.872.784,00	9.203.995.302,00	87,35
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.014.970,00	1.014.750,00	99,98
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.014.970,00	1.014.925,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.929.000,00	14.297.000,00	95,77
2	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.959.002,00	14.959.000,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.844.132,00	45.843.500,00	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.881.268,00	39.580.000,00	96,82
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.899.717,00	34.899.500,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.470.000,00	90,36
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.995.000,00	12.272.500,00	61,38
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.121.000,00	137.898.207,00	97,03
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.162.500,00	27.593.000,00	97,98
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.756.495,00	61.558.000,00	99,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.984.000,00	1.047.800,00	35,11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	789.736.029,00	780.363.087,00	98,81
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	125.250.000,00	86,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.600.000,00	68.522.525,00	98,45
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	14.734.400,00	99,56
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.920.000,00	49.189.523,00	98,54
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	81.895.339,00	79.395.000,00	96,95
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.103.816,00	58.321.500,00	85,64
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.199.236,00	343.257.100,00	84,92
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	48.898.325,00	47.265.000,00	96,66
	2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	52.194.791,00	50.540.100,00	96,83
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200.552.449,00	184.403.989,00	91,95
E	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	321.479.628,00	312.416.700,00	97,18
F	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.034.206.805,00	999.378.431,00	96,63
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.549.991.134,00	1.546.423.150,00	99,77
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	522.563.615,00	522.485.600,00	99,99
G	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.515.057,00	22.439.000,00	87,94
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	62.999.532,00	62.270.000,00	98,84
H	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	121.987.647,00	117.419.700,00	96,26
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0,00	-	
I	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	259.486.080,00	250.280.050,00	96,45
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	118.023.911,00	110.052.350,00	93,25
J	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	177.516.563,00	177.406.250,00	99,94
	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		-	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	291.211.280,00	289.965.550,00	99,57

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.813.023,00	30.637.000,00	99,43
K	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.205.447,00	15.191.375,00	99,91
L	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	20.769.388,00	20.726.275,00	99,79
J U M L A H		17.431.183.490,00	15.883.919.189,00	91,12

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sampang


Sra. Hj. SUPARTINI KAPTATI
Pembina Utama Muda
NIP: 19641005 199210 2 001